Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB
ISSN : 2723-0937

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BERAS MISKIN (RASKIN) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN AKIBAT COVID 19 DI DESA BANYU TAJUN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

Saprudin, Ahmat Harahap
saprudin39.ss99@gmail.com, ahmatharahap76@gmail.com

Program Studi Administrasi publik, Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Telp./Fax 0526-2022484, Kode Pos 71571
Email : info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Beras Miskin (Raskin) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid 19 Di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong penting untuk dilakukan, dikarenakan masih ditemukan permasalahan terkait dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Beras Miskin (Raskin) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid 19 Di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Beras Miskin (Raskin) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid 19 Di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Jenis dan pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi dari pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian dara, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data kemudian dilakukan uji kredibilitas data utuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi dari indikator transmisi dikategorikan cukup terimplementasi, dari indikator kejelasan dikategorikan cukup terimplementasi, dan dari indikator konsistensi dikategorikan cukup terimplementasi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi

Kata Kunci : Implementasi, Program, Bantuan Langsung Tunai (BLT)

IMPLEMENTATION OF THE RICE-POOR DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) PROGRAM IN OVERCOMING POVERTY DUE TO COVID-19 IN BANYU TAJUNG VILLAGE, TANJUNG DISTRICT, TABALONG REGENCY

ABSTRACT

Research on the Implementation of the Rice for the Poor (Raskin) Direct Cash Assistance (BLT) Program in Overcoming Poverty Due to Covid 19 in Banyu Tajun Village, Tanjung sub-district, Tabalong Regency, is important to do, because there are still problems related to the Rice for the Poor Direct Cash Assistance (BLT) program (Raskin).) In Overcoming Poverty Due to Covid 19 in Banyu Tajun Village, Tanjung sub-

district, Tabalong Regency. The purpose of this study was to find out and analyze the Implementation of the Rice for the Poor (Raskin) Direct Cash Assistance Program in Overcoming Poverty Due to Covid 19 in Banyu Tajun Village, Tanjung sub-district, Tabalong Regency. Types and approaches to research using descriptive qualitative research. Data collection techniques carried out include the collection of observational data, interviews and documentation. The informants used in this study amounted to 5 people. After the data is collected, it is then analyzed using techniques including data reduction, presentation of data, and verification or drawing conclusions. The data is then tested for data credibility to assess the truth of the qualitative research findings. Based on the results of the discussion above, it shows that regarding the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT), seen from the communication aspect, the transmission indicator is categorized as sufficiently implemented, from the clarity indicator it is categorized as sufficiently implemented, and from the consistency indicator it is categorized as sufficiently implemented. From these results it can be concluded that the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) seen from the communication aspect in Banyu Tajun Village, Tanjung sub-district, Tabalong Regency is categorized as implemented

Keywords: Implementation, Program, Direct Cash Assistance (BLT)

PENDAHULUAN

Keimiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmapuan individua atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari, baik kondisi fisik maupun kondisi ekonnomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki Pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing dengan yang lainnya sehingga berakibat terjadinya pengganggguran.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, peran pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan atau pedoman dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskina, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam hal pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaran kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat miskin di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin salah satunya melalui program beras subsidi. Bantuan beras miskin atau yang biasa disebut Raskin merupakan suatu bantuan yang memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu. Kemudian dalam program

raskin pada tahun 2015 di ganti menjadi rastra.

Sesuai dengan peraturan presiden republic Indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan langsung tunai (BLT), yang mengatur tentang program lanjutan dari bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rasta) dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per keluarga penerimaan manfaat (KPM). Kemudian program bantuan langsung tunai tersebut dituangkan dan diatur dalam peraturan Menteri sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 dan penyempurnaan pada peraturan Menteri nomor 20 Tahun 2019 tentang bantuan langsung tunai, bantuan yang diberikan pemerintahan berupa program voucher pangan yang dapat digunakan untuk menebus dan membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, tempe, dan lainnya diwarung, toko atau yang bekerja sama dengan penyalur. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, masyarakat yang belum sejahtera akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli sembako dengan kualitas yang lebih baik serta memperoleh nutrisi yang lebih seimbangan.

Bantuan langsung tunai (BLT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM (keluarga penerima manfaat) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbangan kepada KPM (keluarga penerimaan manfaat), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM (keluarga penerima manfaat), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM (keluarga penerima manfaat) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Kemudian menindak lanjuti Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dikeluarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi masyarakat Berpendapat Rendah, maka program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterapkan di semua desa di seluruh Kabupaten Tabalong salah satunya di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung. Pada Desa Banyu Tajun Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan oleh Sekertaris Desa Bersama dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra) dan pendamping Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta dibantu oleh oleh Ketua RT setempat.

Berdasarkan surat edaran Bupati Tabalong No. B.134 Tahun 2020 sebanyak 5.123 kepala keluarga di Tabalong, telah menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Sementara untuk di Desa Banyu Tajun sebanyak 93 kepala keluarga, hasil observasi sementara, ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa Implementasi Program Langsung Tunai (BLT) di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan baik, namun ada juga sebagiam masyarakat yang mengatakan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai belum terlaksana dengan baik. Implemntasi tersebut dilihat dari teori impelementasi George C. Edward lll, terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada implementasi program bantuan langsung tunai dilihat dari aspek disposisi pada indikator staff, informasi,

wewenang, dan fasilitas sudah baik. Kemudian implementasi program bantuan langsung tunai dilihat dari aspek disposisi pada indikator pengangkatan birokrat dan insentif sudah baik. Dan implementasi program langsung tunai dilihat dari aspek sturuktur birokrasi pada indikator standar opresional prosedur dan fragmentasi sudah optimal. Namun pada implementasi program bantuan langsung tunai dilihat dari aspek komunikasi, terdapat keluahan masyarakat tentang informasi mekanisme Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disampakan oleh petugas belum memberikan kejelasan dan kosistensi karena penyampaian informasi berbelit-belit, materi edukasi yang disampaikan terdapat istilah dan singkatan-singkatan yang asing bagi masyarakat, informasi waktu dan tempat pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program yang sering berubah-ubah, serta waktu penyaluran dana yang disediakan sering berubah-ubah. Sehingga masih banyak belum mengerti dan menyebabkan kebingungan tentang mekanisme Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Kantor Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong masih ditemukan permasalah dalam proses pelaksanaan program, keluhan masyarakat menjadi bukti bahwa kenyataannya program belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dalam hal ini sesuai dengan peenelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2019), (Muslim, 2012), dan (Mulyadi, 2019) yang menyimpulkan bahwa "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum optimal karena rendahnya pengentahuan masyarakat masyarakat tentang program BLT dan rendahnya tingkat kepatuhan implementor yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah menurut Anggi Agrayani Siregar ", " Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosesnya dan masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar untuk menerima bantuan menurut M. Hidayat Panutuan Muslim","sumber daya manusia yang masih kurang, karakteristik pelaksanaan yang tidak mengetahui adanya aturan mengenai BLT dan tidak adanya komunikasi antar dinas terkait menurut Andi Mulyadi". Dan tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilalukukan oleh (Azizah, 2019), (Azizah, 2019), dan (Dionita Putri Anwar, 2020), (Dionita Putri Anwar, 2020), (Dionita Putri Anwar, 2020) yang menyimpulkan bahwa "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah optimal karena dalam pendistribusian program BLT sudah cukup optimal dan tepat sasaran, serta pihak kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak dinas sosial yang sekaligus juga pelaksana dari Program tersebut sehingga sejauh ini program tersebut bias diangggap berhasil untuk membantu warga miskin yang yang ada di kelurahan alalak selatan Menurut Azizah, Akhmad Nikhrawi Hamdie, H. Muhammad Uhaib As'ad", dan " karakteristik masalah dalam pelaksanaan Program BLT di kelurahan Sisir masih nihil, Karakteristik Program dalam pelaksanaan Program BLT dinilai sudah tepat sasaran Sumber Daya Manusia di Kelurahan Sisir dirasa sudah memenuhi tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dicantumkan, dan Variabel Lingkungan untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam Program BLT sudah mendukung dalam pelaksanaannya menurut Dionita Putrti Anwar, Nurul Umi Ati, Roni Pindahato."

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dilihat dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong"

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian (Azizah, 2019) Tentang "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin", tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjaramasin Utara Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dan dokumuntasi dengan empat orang informan. Sempel ditentukan dengan menggunakan Teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Dalam pendistribusian program BLT sudah cukup optimal dan tepat sasaran, dan pihak kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak dinas sosial yang sekaligus juga pelaksana dari program tersebut sehingga sejauh ini program tersebut bisa dianggap berhasil untuk membantu warga miskin yang ada dikelurahan alalak selatan.
2. Hasil penelitian dari (Dionita Putri Anwar, 2020) tentang "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Gambaran Umum Bantuan Langsung Tunai (2) Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dinas Sosial Di Kelurahan sisir Kecamatan Kota Batu", (3) Faktor pendukung dan penghambat Program Bantuan Langsung Tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitati, pada pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantunagan, dan kepastian yang bertujuan untuk untuk mengecek keabsahan data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu disimpulkan bahwa : 1) Karakteristik Masalah : Karakteristik masalah dalam pelaksanaan Program BLT di kelurahan sisir masih nihil. 2) Karakteristik Program dalam Pelaksanaan Program BLT dinilai sudah tepat sasaran karena Sumber Daya Manusia di kelurahan sisir dirasa sudah memenuhi tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dicantumkan. 3) Variabel Lingkungan : Kesimpulan untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam Program BLT sudah mendukung dalam pelaksanaanya. 4) Program Bantuan Langsung Tunai memiliki faktor pendukung yaitu dengan pemerintah atau pelaksana kegiatan cukup tanggap akan kendala-kendala yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat.

3. Hasil penelitian dari (Siregar, 2019) Tentang "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu", pelaksanaan transformasi Rasta dari subsidi beras ke bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk langsung tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulanya melalui mekanisme akun elektronik yang bekerjasama dengan pihak aparator desa. Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai ini pada bulan oktober tahun 2018. Impelementasi program bantuan langsung tunai di kecamatan Rantau Utara ini tentu masih mengalami permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dan kendala-kendala Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Implmentasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kecamatan Rantau Utara ini dilihat dari segi teori implementasi menurut Marllie S. Grindle yaitu dari aspek isi kebijakan dan dari aspek lingkungan kebijakan belum berjalan dengan baik. Selain itu juga dilihat dari indikator keberhasilan Implementasi Program BLT yaitu 6T (6 Tepat), dimana 6T ini sangat menentukan kesuksesan suatu Program BLT di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan dilapangan program BLT ini ada dua indikator 6T yang tidak memenuhi yaitu Tepat sasaran dan tepat waktu. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Program BLT dan rendahnya tingkat kepatuhan implementor yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah

4. Hasil penelitian (Muslim, 2012) tentang "Implementasi Program

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang", penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa bahwa berdasarkan observasi awal, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan dan mensejahterakan keluarga penerima bantuan. Banyaknya masyrakat yang kurang memahami dan mengapresiasikan komitmen pemerintah membuat program ini tidak berjalan dengan baik. Jenis dan analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer berupa proses wawancara langsung dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari literatur kelembagaan yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber data. Serta Teknik pengumpulan data dengan Teknik reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian menggunakan model George C. Edward ini menunjukan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum berjalan dengan baik karena : 1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai belum dapat dijalankan sesuai SOP yang ada dikarena masih ada masyarakat yang tidak memahami program BLT. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara Pemerintah Kecamatan dengan kelurahan belum berjalan dengan baik maka berpengaruh kepada pelaksanaan Program BLT sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak dapat tercapai secara maksimal. 2. Sumber Daya, terdapat kendala yaitu pada sumber daya anggota yaitu ditemukan bahwa aparat dari Kelurahan serta Tenaga Pendamping belum terlibat dalam pelaksanaan BLT. Maka dari itu jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada seperti sumber daya anggota yang ada belum memadai

5. Hasil penelitian (Mulyadi, 2019) tentang "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi", Implementasi ini berdasarkan hukum Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Langsung Tunai. Dalam penyelenggaraan kebijakan ini ditemukan berbagai fenomena masalah yaitu penyelenggaraan bantuan yang tidak sesuai degan aturan, sumber daya manusia yang masih kurang, pelaksana kebijakan yang tidak mengikuti yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak adanya komunikasi antar dinas terkait. Teknik pengumpulan data primer oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu Peratuaran presiden nomor 63 tahun 2017. Teori yang digunakan adalah teori Van Metter & Van Horn dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini belum berjalan sesuai dengan aturan karena dapat dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, jumblah sumber daya manusia yang masih kurang, karakteristik pelaksanaan yang tidak

mengetahui adanya aturan mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tidak adanya komunikasi antar dinas terkait. Saran peneliti yaitu agar para pelaksana kebijakan mengetahui mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 agar para pelaksanaan program ini dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengertian Kebijakan

Secara konseptual kebijakan publik dapat di lihat dari kamus Administrasi publik Chandler dan Plano dalam (Dwijanowijoto, 2016), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan .

Selanjutnya William N. Dunn dalam (Anggara, 2017) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkain pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan kemanan, energi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Kemudian (Solichin, 2008) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan beberapa pedoman

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuat kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap–tahap ini dengan urutan yang berbeda .

Tahap–tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagai mana di kutip (Winarno, 2016), yaitu :

1) Tahap penyusunan agenda

   Para pejabat yang di pilih dan di angkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak di sentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan–alasan tertentu di tinda untuk waktu yang lama .

2) Tahap formulasi kebijakan

   Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan, masalah–masalah tadi di definisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options)* yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing–masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai

kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah

3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang di tawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas Legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan .

4) Tahap Implementasi kebijakan

Program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak di Implementasikan, yakni di laksanakan oleh badan-badan Administrasi maupun agen–agen pemerintah di tingkat bawah . Kebijakan yang telah di ambil di laksanakan oleh unit–unit Administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. pada tahap Implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa Implementasi kebijkan mendapat dukungan para pelaksana (*Implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana .

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah di jalankan akan di nilai atau di evaluasi, untuk melihat sejuah mana kebijakan yang di buat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu di tentukan ukuran–ukuran atau kriteria –kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah di laksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang di inginkan atau belum

Pelaksanaan Kebijakan

Menurut (Gaffar, 2015) pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya pelaksanaan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas alam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijak an tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Selanjutnya Dwijowijoto dalam (Gaffar, 2015) pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll

Kemudian (Sunggono, 2015) kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saranasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses pelaksanaan kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut

Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart dalam (Winarno, 2016) evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik. Evaluasi pelaksanaan dalam kegiatan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

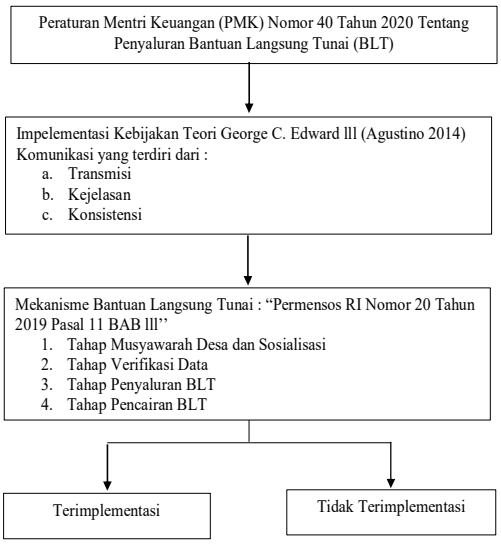
Kemudian Briant & White dalam (Wibawa, 2017) evaluasi pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan tersebut, mengarahkan kepada penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan

Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2008) Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan 2) adanya aktivitas atau kegiatan mencapai tujuan dan 3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian (research methods) yaitu cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk

merancang, dilaksanakan, membuat data, dan di tarik kesimpulan berkenan untuk masalah penelitian tersebut. Jenis penelitian deskriptif (descritiptive research) merupakan yaitu metode penelitian untuk ditunjukan dalam menggambarkan fenomena yang ada, langsung pada waktu ini atau waktu yang lampau.

Berdasarkan ahli di atas, jenis-jenis penelitian menggunakan yaitu jenis deskriftif tentang Implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Sumber Data

1) Data primer
   Data primer adalah data yang di peroleh dari peneliti secara langsung dari hasil penelitian, kemudian diolah sendiri yakni data yang di gunakan untuk analisis maupun untuk pembahasan hasil.
2) Data sekunder
   Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, laporan-laporan serta data lainnya terkait dengan penelitian yang dibahas

Teknik Analisis Data

Untuk menguatkan penelitian yang dilakukan maka penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2013) dengan menggunakan 4 metode analisis interaktif, yaitu :

1. Pengumpulan Data atau Data Collection adalah pengumpulan data mentah yang diperoleh dari data dilapangan.
2. Kondensi Data merupakan data mengacu pada proses pemilihan, focus, menyederhanakan, membuat abstrak, atau mengubah data yang ada pada saat kegiatan penelitian. Dengan cara membuat catatan baik secara tertullis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. Display Data/ Penyajian dalam melakukan penyajian data dapat dilakukan dengan cara membuat uraian singkat, bagan ,hubungan antar ketegori, flowchart dan sejenisnya. Sehingga dapat mengambarkan kesimpulkan dan tindakan.
4. Conclusing Drawing/ Verifying, Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan akan berubah jika bukti-bukti yang ditemukan dilapangan tidak mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Dalam penarikan kesimpulan data yang telah terkumpul kemudian akan diverifikasikan dengan berbagai pendapat dan teori-teori yang digunakan dalam kerangka berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

1. Transmisi

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah mendapat informasi mengenai kegiatan registrasi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator transmisi dalam tahap sosialisasi dikategorikan cukup terimplementasi

Kemudian hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada 5 orang ya/sudah mendapat informasi mengenai penyaluran BLT program BLT. Berdasarkan hasil wawancara tersebut

dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator transmisi dalam tahap penyaluran BLT dikategorikan cukup terimplementasi

Selajutnya berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah mendapat informasi mengenai kegiatan pencairan dana BLT program BLT. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator trasmisi dalam tahap pencairan dana BLT dikategorikan cukup terimplementasi

2. Kejelasan

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada 3 orang menjawab ya/sudah jelas, dan 2 orang menjawab belum jelas mengenai informasi Verifikasi Data. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator kejelasan dalam tahap sosialisasi dikategorikan cukup terimplementasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 orang menjawab ya/sudah jelas dan 2 orang menjawab belum jelas mengenai informasi pada tahap Verifikasi Data. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator kejelasan dalam tahap Verifikasi Data dikategorikan cukup terimplementasi

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 orang menjawab ya/sudah jelas, dan 2 orang menjawab belum jelas mengenai tahap penyaluran BLT. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator kejelasan dalam tahap penyaluran BLT dikategorikan cukup terimplementasi

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 orang menjawab ya/sudah jelas, dan 2 orang menjawab belum jelas mengenai informasi Pencairan Dana BLT. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator kejelasan dalam tahap Pencairan Dana BLT dikategorikan cukup terimplementasi.

3. Konsistensi

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah konsisten, dan 1 orang menjawab belum konsisten mengenai informasi pada tahap Musyawarah dan Sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator konsistensi dalam tahap Musyawarah dan Sosialisasi dikategorikan terimplementasi

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahu bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah jelas dan 1 orang menjawab belum jelas mengenai informasi pada tahap Verifikasi Data. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator konsistensi dalam tahap Verifikasi Data dikategorikan terimplementasi

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 orang menjawab ya/sudah konsisten dan 2 orang menjawab belum konsisten mengenai informasi pada tahap Penyaluran BLT.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator konsistensi dalam tahap Penyaluran BLT dikategorikan cukup terimplementasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 orang menjawab ya/sudah konsisten dan 2 orang menjawab belum konsisten mengenai informasi pada tahap Pencairan Data BLT. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Lanhsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi berdasarkan indikator konsistensi dalam tahap Pencairan Data BLT dikategorikan cukup terimplementasi.

Pembahasan

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Dari hasil rekapitulasi jawaban wawancara tersebut serta dari pengamatan penulis, maka penulis menyimpulkan atau membahas dengan dukungan teori George C. Edward III (2008) yaitu aspek komunikasi yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong seperti berikut :

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi yang dikemukakan oleh Edward (2008), dari indikator :

1) Transmisi (Penyaluran informasi)

Penyaluran informasi terhadap tahap sosialisasi, verifikasi data, penyaluran BLT dan pencairan dana BLT, maka diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima informan bahwa informasi mengenai adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banyu Tajun dan mekanisme program sudah di salurkan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah, Ahkmad Nikhrawi Hamdie, H. Muhammad Uhaib As'ad (2009), Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati, Roni Pindahantu (2020) yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berjalan dengan baik dan optimal.

2) Kejelasan

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi yang dikemukakan oleh Edward (2008), dari indikator kejelasan terhadap tahap sosialisasi, verifikasi data, penyaluran BLT, pencairan dana BLT, maka diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang sebagian mengatakan bahwa komunikasi yang diberikan mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah jelas dan sebagian kurang jelas karena penyampaian informasi sosialisasi dan verifikasi data berbelit-belit, materi penyaluran BLT dan pencairan dana BLT yang disampaikan menggunakan singkatan dan istilah-istilah asing yang sulit dipahami, serta adanya perbedaan informasi sehingga terjadi bias di masyarakat mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggi Anggrayni Siregar (2019), M. Hidayat Panuntun Muslim

(2019), dan Andi Mulyadi (2019), yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan optimal.

3) Konsistensi

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi yang dikemukakan oleh (Agustino, 2008), dari indikator konsistensi terhadap tahap sosialisasi, verifikasi data, penyaluran BLT dan pencairan dana BLT, maka diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebagian informan merasa komunikasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum konsisten, terdapat kendala pada waktu pelaksanaan registrasi yang tidak pasti, penyerahan kartu keluarga sejahtera yang tidak pasti, waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi data dan pencairan dana BLT yang tidak pasti dan berubah-ubah, waktu penyaluran dana KPM tidak pasti, Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2019), (Muslim, 2012), dan (Mulyadi, 2019), yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan optimal.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi dari indikator transmisi dikategorikan cukup terimplementasi, dari indikator kejelasan dikategorikan cukup terimplementasi, dan dari indikator konsistensi dikategorikan cukup terimplementasi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Azizah, 2019), dan (Dionita Putri Anwar, 2020) yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berjalan dengan baik, dan tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Azizah, 2019) dan (Mulyadi, 2019), yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan optimal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan cukup terimplementasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Azizah, A. N. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Dionita Putri Anwar, N. U. (2020). Implementasi Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu .

Dwijanowijoto, N. (2016). *Kebijakan Publik (Formulasi, Impementasi, dan Evaluasi).* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Gaffar, A. (2015). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi Cetakan Ke 5.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulyadi, A. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

Muslim, M. H. (2012). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Siregar, A. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sunggono, B. (2015). *Hukum dan kebijaksanaan publik, Law-Indonesia; Public policy (Law)-Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wibawa, S. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses.* Yogyakarta: Med Press.